



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

LKIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777
Website : dputrprkplh.tasikmalayakab.go.id e-mail : dputrprkplh@tasikmalayakab.go.id
Mangunreja 46462

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.10.06/KEP.122/DPUTRLH/2025

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa rancangan akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;

- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan. Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor OT.05/Kep.11/DPUTRLH/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

KETIGA : Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan KEDUA bertujuan sebagai:

- 1) Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
- 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
- 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- 4) Penyempurnaan kebijakan yang diperlukan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Singaparna
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya



DRS. A. M. RAHMAT SLAMET, M.Pd
NIP. 19660613 199203 1 009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777
Website : dputrprkplh.tasikmalayakab.go.id e-mail : dputrprkplh@tasikmalayakab.go.id
Mangunreja 46462

**BERITA ACARA
REVIU LKIP DINAS PUTRLH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Nomor : RC.04/596/DPUTRLH/2025

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 24 Januari 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Acara dipimpin oleh Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya selaku Penanggungjawab Penyusunan LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas selaku Ketua Tim dan seluruh Kepala Bidang dan Anggota Tim Penyusun LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Hasil Reviu LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, telah disepakati kesesuaian bab per bab dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah termasuk kesesuaian data kinerja yang disajikan telah disepakati oleh masing-masing unit kerja yang disandingkan Perjanjian Kinerja dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024 beserta perbandingan-perbandingannya.




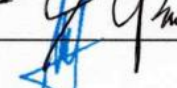



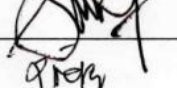
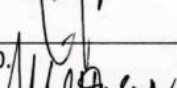
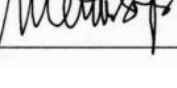
Demikian Berita Acara Reviu LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dan disepakati pada tanggal tersebut di atas, dengan dilampirkan Lembar Pengesahan LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya



DRS. A. M. RAHMAT SLAMET, M.Pd
NIP. 19630713 199203 1 009

**LEMBAR PENGESAHAN LKIP DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. AAM RAHMAT SELAMET, M.Pd.	Kepala Dinas	1. 
2.	ELA KOMALA, ST, MM	Sekretaris Dinas	2. 
3.	ANY RUSMANA, S.SOS, M.SI	Kepala Bidang SDA	3. 
4.	ECEP SUKRON MUNIR, S.T., M.M.	Kepala Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi	4. 
5.	YAFIT KHAIRUL ADNAN, ST.,MT.	Kepala Bidang Penataan Ruang	5. 
6.	ROMI GARDARA, ST.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	6. 
7.	ADE RINO RISNANDAR, ST	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7. 
8.	INE SUSYANE, S.T.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	8. 
9.	ARIEF KURNIAWAN, S.Kom	Perencana Ahli Muda	9. 
10.	WINDA DWI MEIDASARI, SE, M.Si	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	10. 

KATA PENGANTAR

اَسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mengemban amanah sebagai penyelenggara 3 (tiga) urusan pemerintahan dan juga termasuk dalam perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang pekerjaan umum dan urusan bidang perumahan rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 6 (enam) bidang dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dokumen LKIP ini merupakan bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur dengan memperhatikan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, semoga dokumen LKIP ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan serta menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tasikmalaya, 31 Januari 2025
**KEPALA DPUTRLH
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



Drs. AAM RAHMAT SELAMET, M.Pd
NIP. 19680813199203 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
a. Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
b. Struktur Organisasi	I-3
c. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	I-4
d. Isu Aktual	I-8
e. Sistematika Penulisan	I-10
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
a. Rencana Strategis Perangkat Daerah	II-1
b. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	II-2
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
a. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
b. Realisasi Anggaran	III-35
c. Analisis Efisiensi	III-38
Bab IV Penutup	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kendaraan Operasional DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	I-5
Tabel 1.2.	Sarana Kerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	I-6
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja (Perubahan) DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-2
Tabel 3.1.	Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	III-1
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024	III-2
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun Pelaporan Dan Realisasi Pada Tahun Sebelumnya	III-29
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmlaya Pada Tahun Pelaporan Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra SKPD	III-30
Tabel 3.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Dan Peningkatan/ Penurunan Pencapaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2024	III-31
Tabel 3.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-32
Tabel 3.7.	Capaian Program/Kegiatan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-33
Tabel 3.8.	Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-33
Tabel 3.9.	Akuntabilitas Keuangan	III-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	I-4
Gambar 1.2.	ASN Dan PPPK DPUTRLH berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	I-4
Gambar 3.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-5
Gambar 3.2.	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-7
Gambar 3.3.	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-10
Gambar 3.4.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-12
Gambar 3.5.	Kegiatan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-15
Gambar 3.6.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-17
Gambar 3.7.	Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-19
Gambar 3.8.	Kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-21
Gambar 3.9.	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	III-23
Gambar 3.10.	Kegiatan Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	III-26

BAB I PENDAHULUAN



Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat : DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu Pemerintah Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja dan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPUTRLH sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan penerapan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang **dimaksudkan** sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Adapun **tujuan** dari penyusunan LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya ini adalah sebagai media penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu : 1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 2) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan 3) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Tasikmalaya.

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, khususnya pada Bagian Ketujuh Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. DPUTRLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPUTRLH mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum,

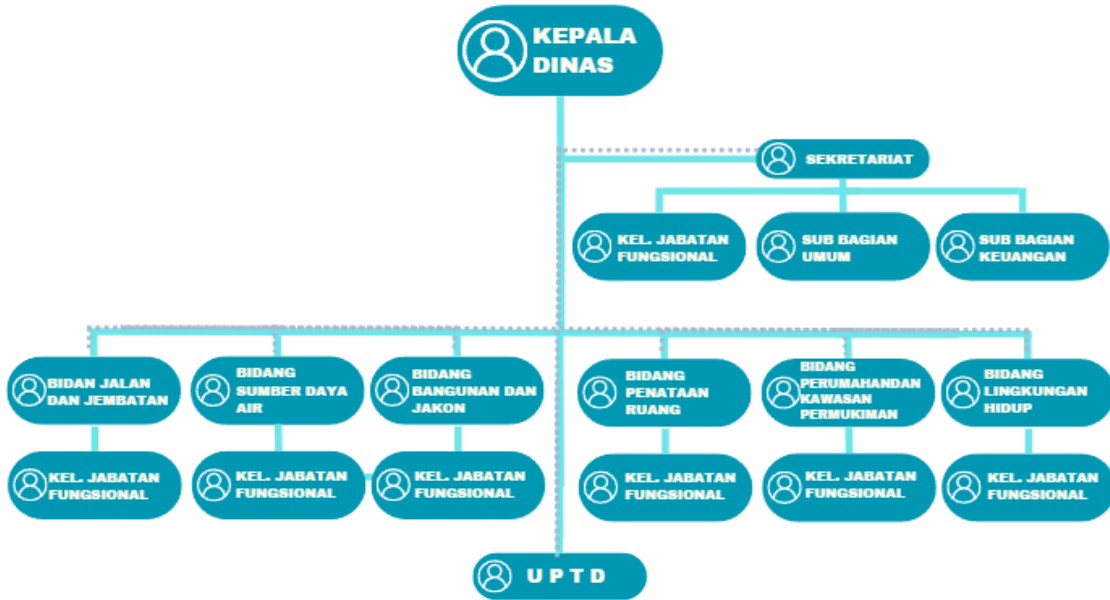
- penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penataan Ruang;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Lingkungan Hidup;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

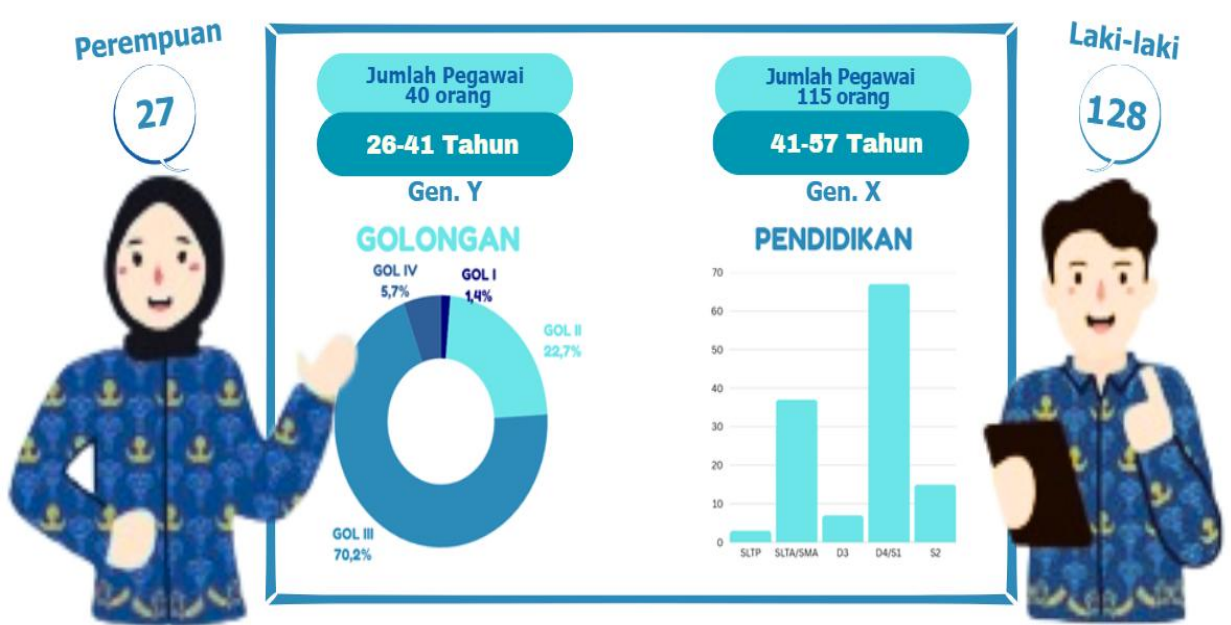
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya



C. ASPEK KEPEGAWAIAN, SARANA DAN PRASARANA

Dalam aspek kepegawaian, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2024, jumlah aparatur DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **155 orang**, terdiri dari 135 ASN dan 20 PPPK, yang secara jumlah dan komposisinya dapat dilihat dengan profil sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Pegawai DPUTRLH Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan



Berdasarkan data pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2024, menurut **jenis kelamin** pegawai DPUTRLH terdiri dari 128 orang laki-laki dan 27 perempuan dengan didominasi oleh Gen X (rentang umur 41 – 57 tahun) sebanyak 115 orang dan Gen Y (rentang umur 26-41 tahun) sebanyak 40 orang. Sedangkan menurut **golongan**, mayoritas pegawai DPUTRLH menduduki golongan III (70,2%) dan menurut **pendidikan**, didominasi jenjang pendidikan Sajana (S-1) dan SLTA. Kondisi ini bermakna bahwa DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan perubahan *mindset* dan *cultural set* organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif, terbuka dan berorientasi teknologi informasi.

Dari aspek **sarana prasarana**, kinerja pelayanan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh kendaraan operasional dan sarana kerja sebagaimana disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Kendaraan Operasional DPUTRLH
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Alat-alat angkutan , terdiri dari :		
	1. Kendaraan Roda 4 (Empat)		
	- Mini Bus	22	Unit
	- Pick Up	17	Unit
	- Truck	5	
	2. Kendaraan Roda 6 (Enam)		Unit
	- Dump truck	9	
	3. Kendaraan Roda 3 (Tiga)		Unit
	- Viar	3	
	4. Kendaraan Roda 2 (Dua)		Unit
	- Sepeda Motor	49	Unit
2	Alat Berat		Unit
	- Asphalt Mixing Plant	2	Unit
	- Macadam Roller/Three Whell Roller	1	Unit
	- Tandam Roller	5	Unit
	- Stamper	24	Unit
	- Compacting Equipment Lain-lain	4	Unit
	- Stone Crushing Plant	23	Unit
	- Wheel Loader+Attachmnet	2	
	- Loader Lain-lain	1	Unit
	- Portable Compresor	1	Unit
3	Alat-alat Lainnya		Unit
	- Lubricating Equipment	2	Unit
	- Perkakas Bengkel Listrik	1	Unit
	- Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	9	Unit
	- Global Positioning System	22	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
	- ALat Ukur Universal Lain-lain	5	Unit
	- Alat Ukur Lainnya	4	Unit
	- Universal tester lainnya	1	Unit
	- Pompa Air	11	Unit
	- Alat Pengukur Curah Hujan	21	Unit
	- Timbangan Meja	1	Unit
	- Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak (dst)	1	Unit
		4	Unit
	- Alat Laboratorium lainnya	1	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	
		9	
	- Brandkas		
	- Generating Set		

Sumber: Pengurus Barang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
(per 31 Desember 2024)

Tabel 1.2.
Sarana Kerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Listrik	1	Jaringan
2	Alat Komunikasi Telepon	2	Line (1Fax)
3	Peralatan Jaringan Lainnya	6	Uniot
4	Area Parkir	1	Area
5	Lemari Kaca	2	Unit
6	Lemari kayu	14	Unit
7	Alat Penghancur Kertas	15	Unit
8	Mesin Absensi	2	Unit
9	Meja Resepsionis	52	Unit
10	Meja Kerja	15	Unit
11	Meja Komputer	1	Unit
12	Sofa	1	Unit
13	Lemari arsip	2	Unit
14	Mesin Potong Rumput	49	Unit
15	AC	18	Unit
16	Radio	1	Unit
17	Tustel	17	Unit
18	P.C Unit	26	Unit
19	Laptop	44	Unit
20	Printer	128	Unit
21	Geological Hammer	1	Unit
22	Server	4	Unit
23	Camera + Attachment	14	Unit
24	Lensa Kamera	3	Unit
25	Infocus	4	Unit
26	Drill Machine	3	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
27	Balance	2	Unit
28	Drilling	1	Unit
29	Rammer	10	Unit
30	Personal Komputer	13	Unit
31	Meja Kerja	15	Unit
32	Lemari Besi/Metal	2	Unit
33	Rak Besi	3	Unit
34	Rak Kayu	6	Unit
35	Filing Cabinet Besi	6	Unit
36	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
37	Papan Nama Instansi	1	Unit
38	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	Unit
39	Peralatan Jaringan Lainnya	6	Unit
40	Traffic Light	1	Unit
41	Hard Disk	5	Unit
42	Scanner	1	Unit
43	Note Book	42	Unit
44	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit
45	Teropong	1	Unit
46	Alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	Unit
47	Meja ½ Biro	15	Unit
48	Kursi Tamu	1	Unit
49	Bangku Tunggu	22	Unit
50	Mebeuleur lainnya	1	Unit
51	Lemari Es	1	Unit
52	Alat Pendingin Lainnya	6	Unit
53	Televisi	5	Unit
54	Sound System	3	Unit
55	Tangga Alumunium	1	Unit
56	Podium/Mimbar	1	Unit
57	Gordyin	1	Unit
58	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	Unit
59	Detektor Kebakaran	1	Unit
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
62	Peralatan Audio Studio	4	Unit
63	Camera Elektronik	1	Unit
64	Camera View Finder	1	Unit
65	Photo Tustel	3	Unit
66	Layar Film/Projector	8	Unit
67	Alat Studio Video lainnya	1	Unit
68	Peralatan umum lainnya (dst)	8	Unit
69	Alat Komunikasi Sosial	4	Unit
70	Genset	1	Unit
71	Exkavator	1	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
72	Concrete Hammer Set	1	Unit
73	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya	8	Unit
74	Alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	Unit
75	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
76	Distiling Apparatus	4	Unit
77	Alat laboratorium energi surya lainnya (dst)	1	Unit
78	Falling Cone Panatro Meter	1	Unit

Sumber: Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
(per 31 Desember 2024)

D. Isu Aktual

DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya memegang peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan serta peningkatan infrastruktur permukiman dan kawasan strategis. Pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

1) Peningkatan Infrastruktur Jaringan Jalan

Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan isu aktual yang selalu muncul setiap tahun dan dapat dikatakan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2024, dengan memanfaatkan pendanaan yang ada, penyelenggaraan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya lebih difokuskan pada rekonstruksi jalan dan pemeliharaan berkala pada ruas-ruas jalan strategis;

2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan difokuskan pada jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya dibawah 1000 Ha di sentra pertanian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

3) Penataan Kawasan dan Bangunan Gedung Pemerintahan

Isu aktual infrastruktur lainnya yaitu terkait penataan fasilitas terbuka bagi publik di kawasan strategis dan peningkatan kualitas dan penataan bangunan gedung pemerintahan dan gedung kantor Kecamatan untuk menunjang fungsi pelayanan.

4) Peningkatan Peran Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan peran utama untuk mengurangi kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan terkait isu penurunan stunting, DPUTRLH berperan dalam penyediaan akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak.

5) Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan

Isu aktual yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah peningkatan kualitas air dan udara serta peningkatan pengelolaan persampahan mulai dari pengangkutan, distribusi sampai dengan pengelolaan di TPA termasuk penguatan penyediaan sarana dan prasarannya.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (issued strategic) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Strukur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian, Sarana Dan Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

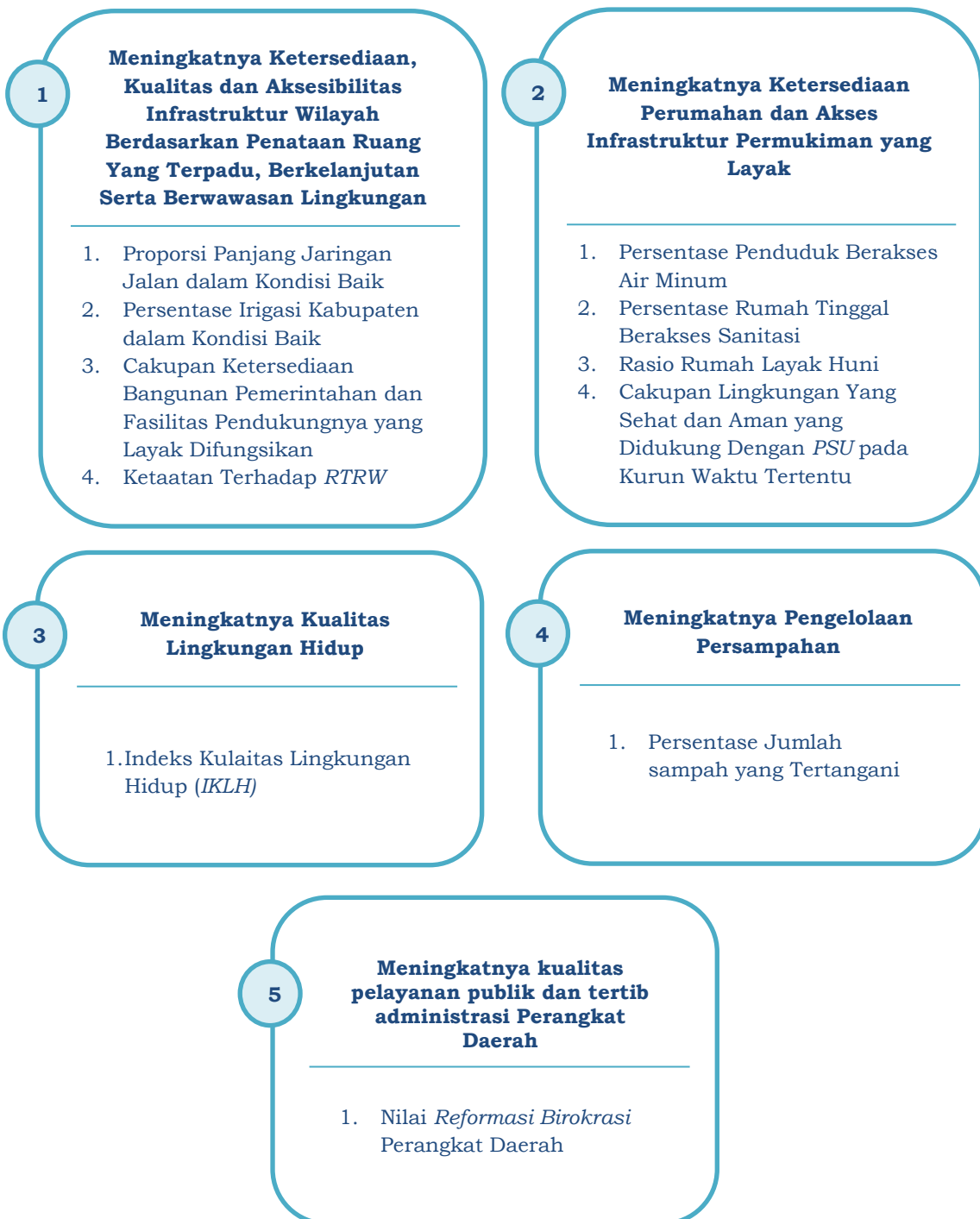
PERENCANAAN

KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dari aspek perencanaan kinerja, tahun 2024 merupakan periode ke-empat dari perencanaan strategis jangka menengah daerah periode Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dimana telah ditetapkan 5(lima) sasaran strategis dan 11(sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).



B. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja (Perubahan) DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,22 (BB)	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,568	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Jalan
		Persentase irigasi Kab. dalam kondisi baik	70,45%	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	62,39%	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Ketaatan terhadap RTRW	26,62%	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur Permukiman Yang Layak	Persentase penduduk berakses air minum	66,93%	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	50,69%	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
		Rasio rumah layak huni	0,2546	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,28%	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,88	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	10,28%	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Persampahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.447.366.156
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	43.592.370.000
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.154.639.000
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.682.402.000
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	10.799.535.700
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.143.614.300
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	137.086.486.494
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	595.200.000
9.	Program Pengembangan Perumahan	150.000.000
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	420.000.000
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	550.950.000
12.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	267050.000
13.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.497.903.000
14.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.300.000.000
15.	Program Pengelolaan Persampahan	3.868.000.000
Jumlah Total		268.510.516.650

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari 5 (lima) sasaran strategis pada Renstra DPUTRLH dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,568	0,568	100
		2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,45	70,45	100
		3. Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	62,39	62,39	100
		4. Ketaatan terhadap RTRW	Persen	26,62	26,62	100
2	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	5. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,93	66,93	100
		6. Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,69	50,69	100
		7. Rasio rumah layak huni		0,2546	0,2546	100
		8. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,28	52,28	100
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,88	65,51	101
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	10. Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	10,28	10,28	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib adm. Perangkat Daerah	11. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	79,22	83,42	105

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan

cara mengumpulkan data kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian sasaran organisasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas PUTRLH menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator sasaran yang didukung oleh program, kegiatan, dan sub-kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 268.510.516.650 dan terealisasi sebesar 98,15% atau sebesar Rp. 263.542.816.149. Oleh karena itu, persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 1,85% atau sebesar Rp. 4.967.700.501. Berikut adalah pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,568	0,568	100%
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,45%	70,45%	100%
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	61,50%	61,50%	100%
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	26,62%	26,62%	100%
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,93%	66,93%	100%
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,69%	50,69%	100%
7.	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2546	0,2546	100%
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,28%	52,28%	100%
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,88	65,51	101%
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	10,28%	10,28%	100%
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	79,22	83,42	105%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2024					100,55%

Tingkat capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 100,55% (**Baik**), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

SASARAN-1

Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

IKU – 1 : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

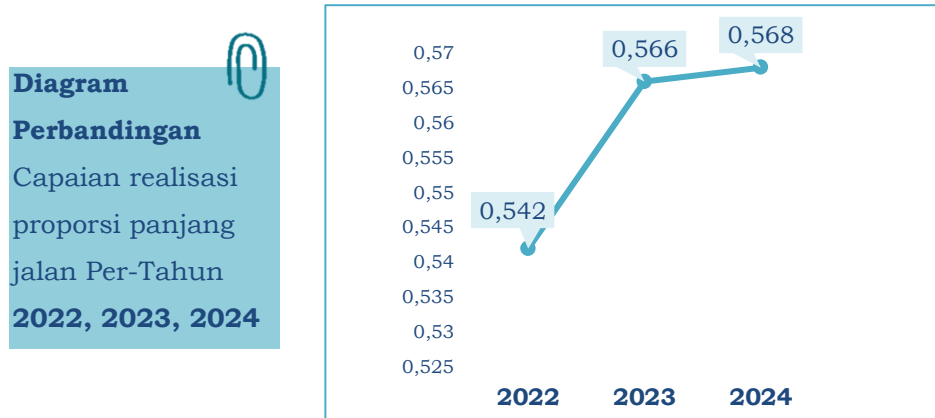


Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merujuk pada persentase dari total panjang jaringan jalan yang ada yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jalan yang dimaksud meliputi aspek-aspek seperti kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan daya tahan jalan tersebut terhadap beban kendaraan dan cuaca.

Pengukuran ini sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas infrastruktur transportasi di suatu daerah atau wilayah. Jaringan jalan yang dalam kondisi baik mendukung kelancaran arus lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi transportasi barang dan orang.

Pada tahun 2024, realisasi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi penurunan sebesar 0,65% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 93,27%, sementara capaian nasional memiliki selisih sebesar 31,64%. Meskipun demikian, capaian proporsi panjang

jalan dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga proporsi panjang jalan semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian proporsi panjang jalan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi proporsi panjang jalan tercatat sebesar 0,542 poin, pada tahun 2023 mencapai 0,566 poin, dan pada tahun 2024 mencapai 0,568 poin.



Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dihitung dengan formulasi : panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya.

Berdasarkan penetapan Kepala Daerah tentang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten (Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya No PU.12.06/KEP.483-DPUTRLH/2023 Tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 178 ruas jalan dengan total panjang jalan sebesar 1.230,47 km. Hingga akhir tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 699,00 km, sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,568 dengan perhitungannya sebagai berikut.

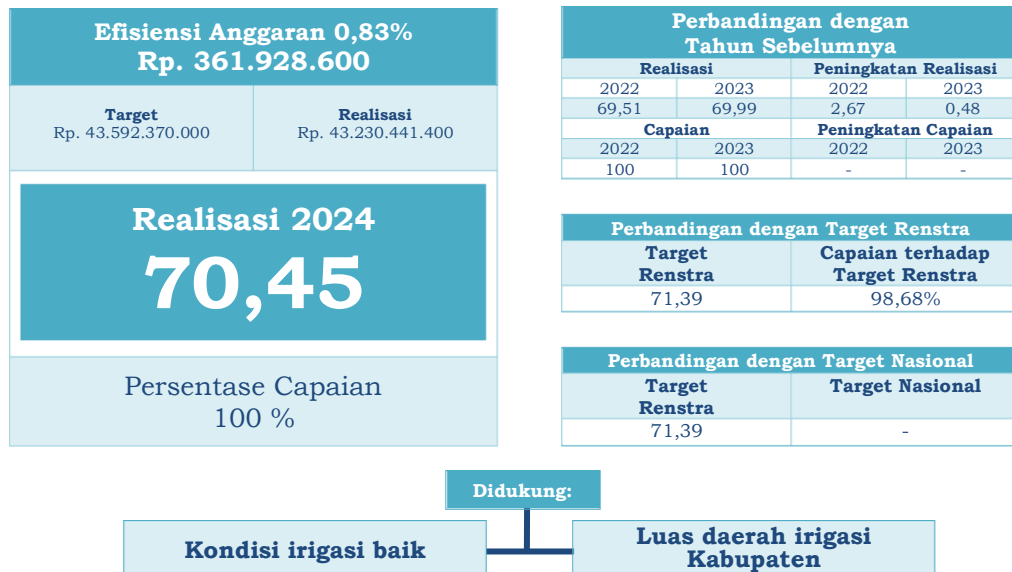
$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} = \frac{699,00 \text{ Km}}{1230,47 \text{ Km}} = 0,568$$

Sumber: Bidang Jalan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024



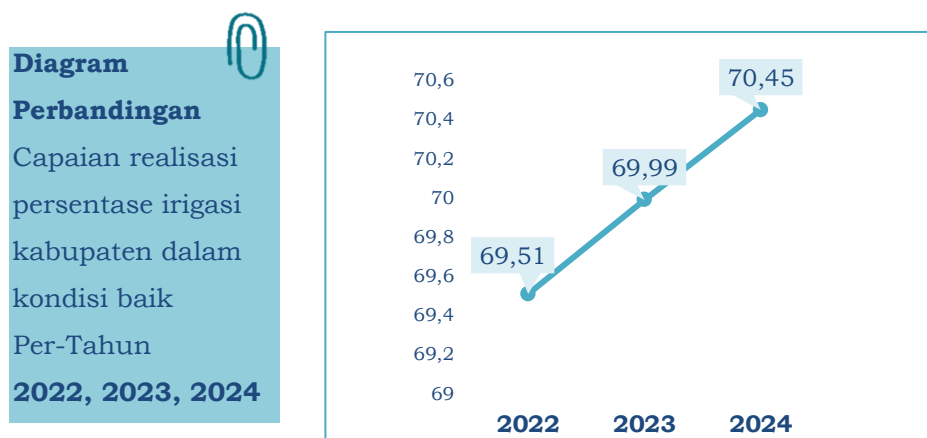
Gambar 3.1.
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

IKU – 2 : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik



Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah ukuran untuk menilai kondisi jaringan irigasi di suatu kabupaten. Ini mencakup persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Pengukuran ini sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai infrastruktur irigasi yang baik dan berfungsi.

Pada tahun 2024, realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 0,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tetap stabil pada tahun ini, tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 98,68%. Meskipun demikian, capaian persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tercatat sebesar 69,51%, pada tahun 2023 mencapai 69,99% dan pada tahun 2024 mencapai 70,45%.



Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dihitung dengan formulasi : luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya dikali 100%.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor. PU.01.01/KEP.332-DPUTRLH/2023 Tentang Lokasi Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 1486 daerah irigasi, dengan total luas sebesar 58.011 HA. Hingga akhir tahun 2024, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 40.869 Ha sehingga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 70,45% dengan perhitungannya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya}} \times 100\% = \frac{40869 \text{ Ha}}{58.011 \text{ Ha}} \times 100\% = 70,45\%$$

Sumber: Bidang PSDA DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2024



Gambar 3.2. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

IKU – 3 :

Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan

Efisiensi Anggaran 3,30% Rp. 427.520.450	
Target Rp. 12.943.150.000	Realisasi Rp. 12.515.629.550
Realisasi 2024 62,39	
Persentase Capaian 100 %	

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
51,40	59,08	3,73	7,68
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100,71	105	-	4,39

Perbandingan dengan Target Renstra	
Target Renstra	Capaian terhadap Target Renstra
71,96	86,83%

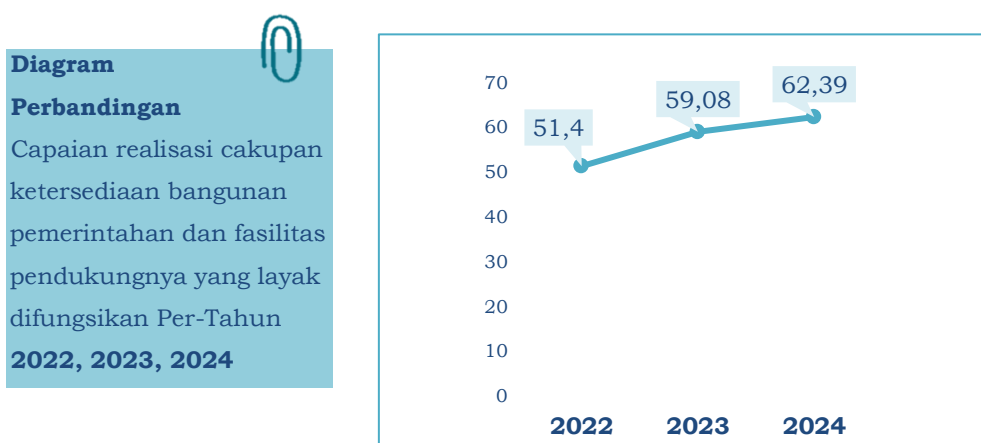
Perbandingan dengan Target Nasional	
Target Renstra	Target Nasional
71,96	-



Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan adalah ketersediaan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Ketersediaan ini mencakup bangunan utama, fasilitas pendukung, dan infrastruktur yang memadai, aman, dan nyaman.

Pengukuran cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Pada tahun 2024, realisasi cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan mengalami peningkatan sebesar 3,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 86,83%. Meskipun demikian, capaian cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian proporsi panjang jalan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan tercatat sebesar 51,40%, pada tahun 2023 mencapai 59,08%, dan pada tahun 2024 mencapai 62,39%.



Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan, dihitung dengan formulasi :
Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik ditambah Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan.

Hingga akhir tahun 2024 tahun 2024 persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik sebesar 46,96% dan persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan sebesar 15,43% sehingga cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan adalah 62,39% dengan perhitungannya sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak} \\
 & \text{difungsikan sebagai pelayanan publik} + \text{Persentase fasilitas} \\
 & \text{pendukung bangunan gedung pemerintahan} \\
 & = 46,96\% + 15,43\% \\
 & = 62,39\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Bangunan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah bangunan pemerintah yang telah dibangun}}{\text{Jumlah kebutuhan bangunan pemerintahan}} \times 80\% \\
 & = \frac{54 \text{ Buah}}{92 \text{ Buah}} \times 80\% = 46,96\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Bangunan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

- ✚ Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan, dihitung dengan formulasi:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah fasilitas pendukung bangunan} \\
 & \text{gedung pemerintahan yang telah dibangun}}{\text{Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung} \\
 & \text{bangunan gedung pemerintahan}} \times 20\% \\
 & = \frac{213 \text{ Buah}}{276 \text{ Buah}} \times 20\% = 15,43\%
 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Bangunan DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2024





Gambar 3.3.
Kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Tahun 2024

IKU - 4 : Ketaatan terhadap RTRW

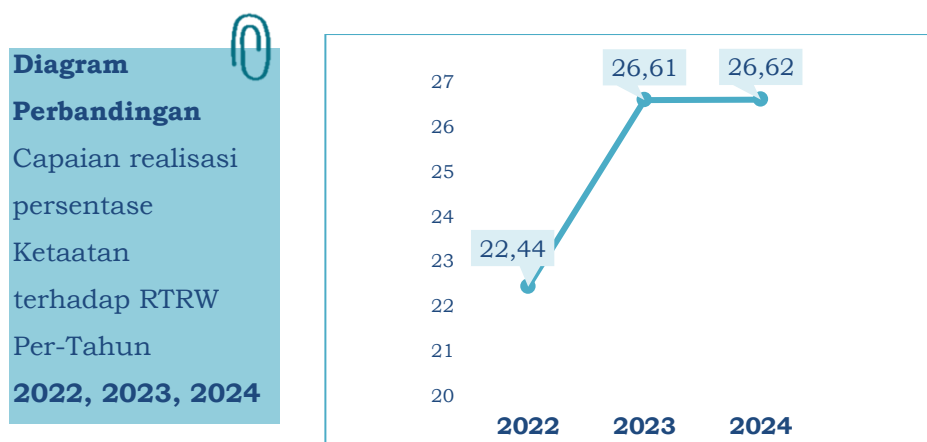


Ketaatan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah kesesuaian antara pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keteraturan dan keselarasan dalam penggunaan ruang.

Pengukuran ketaatan terhadap RTRW awalnya bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, realisasi ketaatan terhadap RTRW mengalami peningkatan sebesar 0,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi peningkatan sebesar 20,28% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan

target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 59,07%. Meskipun demikian, capaian ketaatan terhadap RTRW dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga ketaatan terhadap RTRW semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian ketaatan terhadap RTRW dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi ketaatan terhadap RTRW tercatat sebesar 22,44%, pada tahun 2023 mencapai 26,61%, dan pada tahun 2024 mencapai 26,62%.



Persentase Ketaatan terhadap RTRW, dihitung dengan formulasi Rerata dari pejumlahan Realisasi RTRW pada struktur ruang dengan realisasi RTRW pada pola ruang. Dimana realisasi RTRW pada struktur ruang, dihitung dengan formulasi $\frac{\text{Terlegalisasinya Perbup RDTR}}{\text{Target Perbup RDTR}}$ berdasarkan RTRW. Hingga akhir tahun 2024 jumlah perbup RDTR yang terlegalisir sebanyak 2 dokumen dari target perbup RDTR berdasarkan RTRW yaitu 12 dokumen.

Sedangkan untuk realisasi RTRW pada pola ruang, dihitung dengan formulasi $\frac{\text{Luas lahan yang sesuai}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya}}$ ditambah luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan dibagi Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sampai dengan tahun 2024, luas wilayah kabupaten Tasikmalaya yaitu 270881 Ha dan luas lahan yang sesuai dengan kabupaten Tasikmalaya yaitu seluas 96921,22 Ha.

Hingga akhir tahun 2024, realisasi ketaatan terhadap RTRW mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,01%. Pada tahun 2024 Realisasi RTRW pada struktur ruang sebesar 16,67% dan realisasi RTRW pada pola ruang sebesar 36,58% sehingga Ketaatan terhadap RTRW adalah 26,62% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{(\text{Realisasi RTRW pada Struktur Ruang} + \text{Realisasi RTRW pada Pola Ruang})}{2}$$

$$= \frac{(16,67\% + 36,58\%)}{2} = 26,62\%$$

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Realisasi RTRW pada Struktur Ruang, dapat dihitung sbb:

$$\frac{\text{Terlegalisasinya Perbup RDTR}}{\text{Target Perbup RDTR berdasarkan RTRW}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$= 16,67\%$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Realisasi RTRW pada Pola Ruang, dapat dihitung sbb:

$$\frac{\text{Luas lahan yang sesuai} + \text{Luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya}} \times 100\%$$

$$= \frac{(96921,22 \text{ Ha} + 2173,48 \text{ Ha})}{270881 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 36,58\%$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024



Gambar 3.4.
Kegiatan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

SASARAN-2

Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak

IKU – 5 :

Persentase penduduk berakses air minum

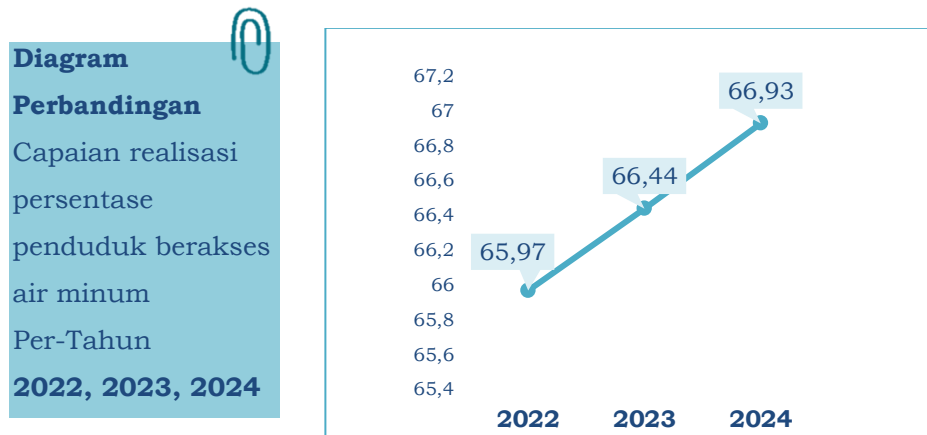


Persentase penduduk berakses air minum adalah proporsi penduduk yang memiliki akses ke sumber air minum yang aman, memadai, dan terjangkau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari.

Pengukuran persentase penduduk berakses air minum dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan dan aksesibilitas air minum yang aman dan memadai bagi masyarakat, sehingga dapat memantau kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum.

Pada tahun 2024, realisasi persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi penurunan sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 98,47%. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk berakses air minum dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga persentase penduduk berakses air minum semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian persentase penduduk berakses air minum dari tahun

2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi persentase penduduk berakses air minum tercatat sebesar 65,97%, pada tahun 2023 mencapai 66,44%, dan pada tahun 2024 mencapai 66,93%.



Persentase penduduk berakses air minum, dihitung dengan formulasi jumlah penduduk berakses air minum dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Dimana jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.803.800 jiwa

Sepanjang tahun 2024 jumlah penduduk berakses air minum mengalami penambahan menjadi 8745 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 1.207.138 jiwa sehingga persentase penduduk berakses air minum menjadi 66,44%.

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$= \frac{1207138 \text{ jiwa}}{1803800 \text{ Jiwa}} \times 100\% = 66,93\%$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Analisis penyebab peningkatan kinerja ini diantaranya adalah adanya peningkatan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait pendanaan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dasar (SPM).



Gambar 3.5. Kegiatan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

IKU – 6 :

Persentase rumah tinggal berakses sanitasi



Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
49,16	50,43	0,25	1,27
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
99,64	101,24	-0,4	1,6

Perbandingan dengan Target Renstra	
Target Renstra	Capaian terhadap Target Renstra
51,19	99,02%

Perbandingan dengan Target Nasional	
Target Renstra	Target Nasional
51,19	-

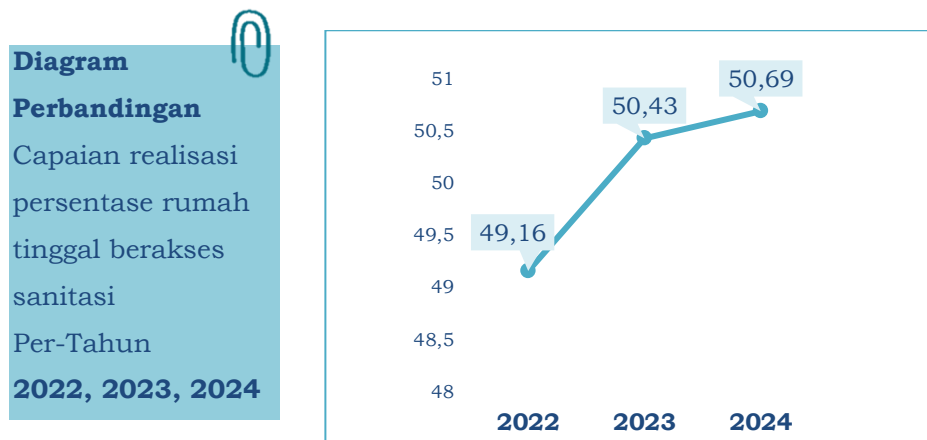


Persentase rumah tinggal berakses sanitasi adalah proporsi rumah tinggal yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, aman, dan sehat, seperti jamban atau toilet yang terhubung dengan sistem pembuangan yang baik.

Pengukuran persentase rumah tinggal berakses sanitasi dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas sanitasi yang memadai dan sehat bagi masyarakat, sehingga dapat memantau kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi dan kesehatan.

Pada tahun 2024, realisasi persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi

penurunan sebesar 1,24% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 99,02%. Meskipun demikian, persentase rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga persentase rumah tinggal berakses sanitasi semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian persentase rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi persentase rumah tinggal berakses sanitasi tercatat sebesar 65,97%, pada tahun 2023 mencapai 66,44%, dan pada tahun 2024 mencapai 66,93%.



Persentase rumah tinggal berakses sanitasi dihitung dengan formulasi jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi jumlah rumah tinggal dibagi 100%. Dimana Jumlah rumah tinggal di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 505122 Rumah.

Sepanjang tahun 2024 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi mengalami penambahan menjadi 1316 SR. Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 256031 rumah, sehingga persentase penduduk berakses air minum menjadi 50,69 %.

$$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$$

$$= \frac{256031 \text{ Rumah}}{505122 \text{ Rumah}} \times 100\% = 50,69 \%$$

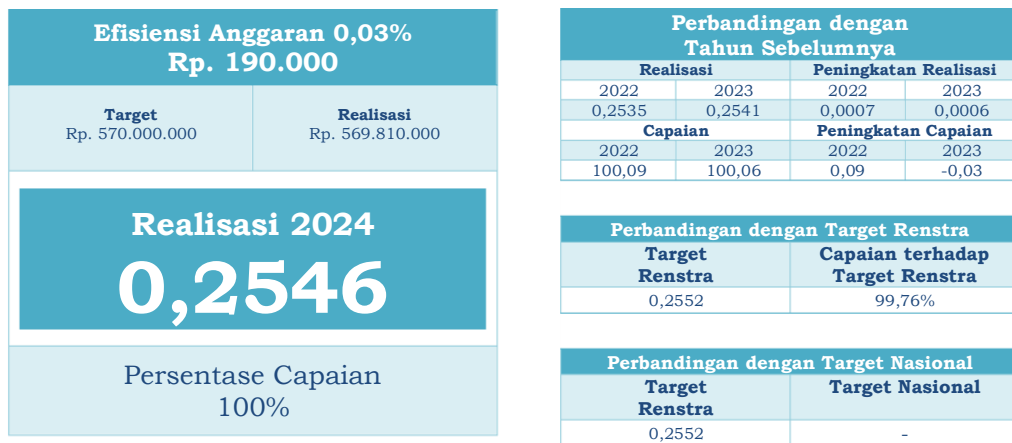
Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024



Gambar 3.6.
Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

IKU – 7 :

Rasio Rumah Layak Huni

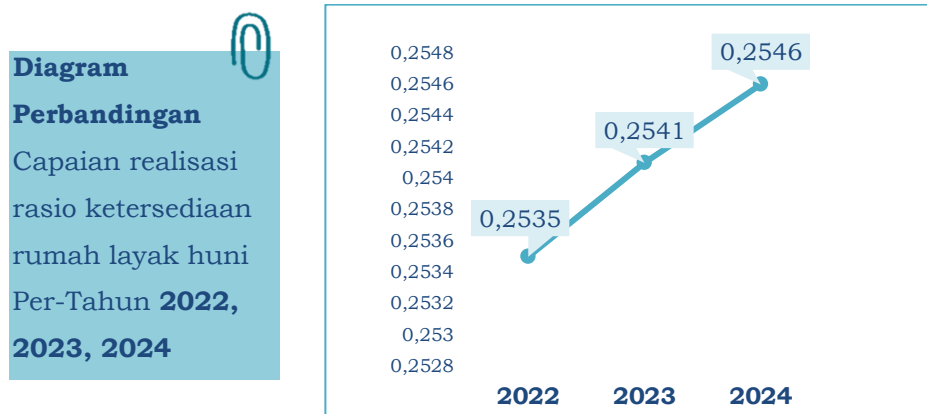


Rasio Ketersediaan rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh penduduk, untuk menilai tingkat ketersediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan huni.

Pengukuran Rasio Ketersediaan Rumah Layak Huni dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan rumah yang layak huni bagi penduduk, sehingga dapat memantau kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, realisasi rasio Ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,0005 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi penurunan sebesar 0,06% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024

teralisasi sebesar 99,76%. Meskipun demikian, Rasio Ketersediaan rumah layak huni dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga Rasio Ketersediaan rumah layak huni semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian Rasio Ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi Rasio Ketersediaan rumah layak huni tercatat sebesar 0,2535 poin, pada tahun 2023 mencapai 0,2541 poin, dan pada tahun 2024 mencapai 0,2546 poin.



Rasio Ketersediaan rumah layak huni, dihitung dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Dimana jumlah penduduk kabupaten tasikmalaya sebanyak 1.803.800 jiwa.

Sepanjang tahun 2024 rumah layak huni mengalami penambahan sebanyak 917 unit. Hal ini diakibatkan karena berkurangnya rumah tidak layak huni di kabupaten tasikmalaya.

Berdasarkan hasil perhitungan bidang teknis, kinerja output perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 Rasio Ketersediaan rumah layak huni adalah 0,2546 dari target 0,2546.

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{459325 \text{ Unit}}{1.803.800 \text{ Jiwa}} = 0,2546$$

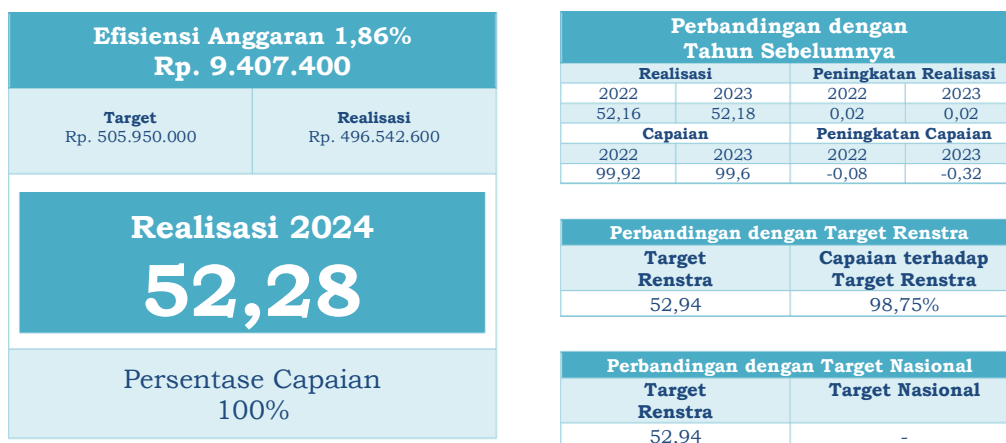
Sumber: Bidang PKP DPURLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024



Gambar 3.7.
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

IKU – 8 :

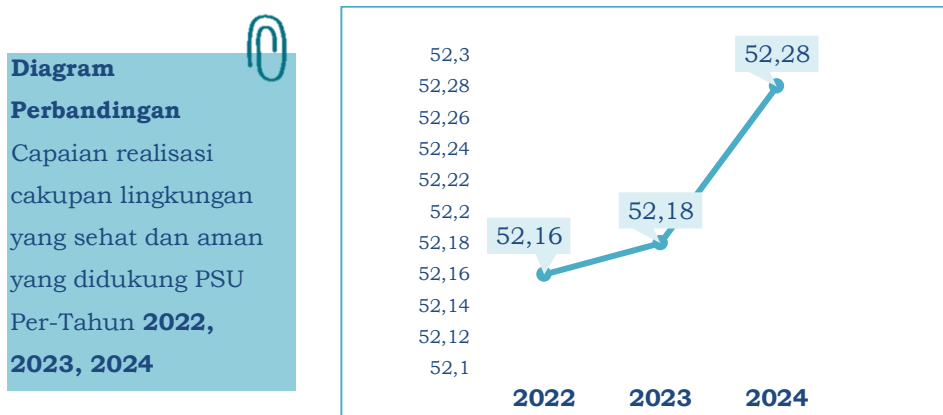
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu



Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana umum (PSU) pada kurun waktu tertentu adalah persentase wilayah atau penduduk yang memiliki akses ke lingkungan yang sehat dan aman, dengan dukungan prasarana dan sarana umum seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, dan lain-lain, dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan dan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat, serta memantau kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lingkungan hidup yang sehat dan aman.

Pada tahun 2024, realisasi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU mengalami peningkatan sebesar 0,0005 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi penurunan sebesar 0,10% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 98,75%. Meskipun demikian, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU tercatat sebesar 52,12%, pada tahun 2023 mencapai 52,18%, dan pada tahun 2024 mencapai 52,28%.



Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu, dihitung dengan formulasi jumlah lingkungan yang didukung PSU dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

Jumlah lingkungan perumahan di kabupetan tasikmalaya adalah sebanyak 4652 Perumahan. Dan pada akhir tahun 2024, jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 2432 Perumahan.

$$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

$$= \frac{2432 \text{ Perumahan}}{4652 \text{ Perumahan}} \times 100\% = 52,28\%$$



Gambar 3.8.
Kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

SASARAN-3

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

IKU – 9 :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

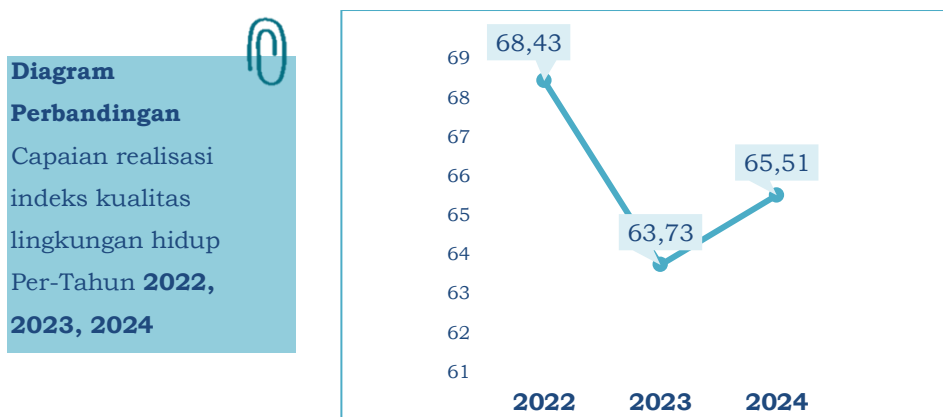


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah atau daerah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kualitas udara, air, tanah,

dan keanekaragaman hayati. IKLH biasanya dihitung menggunakan skor atau nilai yang menunjukkan tingkat kualitas lingkungan hidup, dengan rentang nilai dari buruk hingga baik.

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan untuk mengevaluasi dan memantau kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah atau daerah, sehingga dapat diidentifikasi masalah lingkungan hidup yang perlu diatasi dan dilakukan perencanaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.

Pada tahun 2024, realisasi indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 100,5%. Indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 68,43%, pada tahun 2023 mencapai 63,73%, dan pada tahun 2024 mencapai 65,51%.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dihitung dengan formulasi $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan perhitungan yang sudah disediakan oleh provinsi. Untuk tahun 2024 ini, nilai indeks kualitas air (IKA) sebesar 52,50, indeks kualitas udara (IKU) sebesar 92,66 dan indeks kualitas lahan (IKL) sebesar 37,64. Sehingga nilai indeks kualitas lingkungan

hidup pada tahun ini sebesar 64,88. Menalami kenaikan sebesar 1,15 dari tahun sebelumnya.

Nilai IKLH

$$\begin{aligned} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 (52,50)) + (0,405 (92,66)) + (0,219 (37,64)) \\ &= 65,51 \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024



Gambar 3.9.

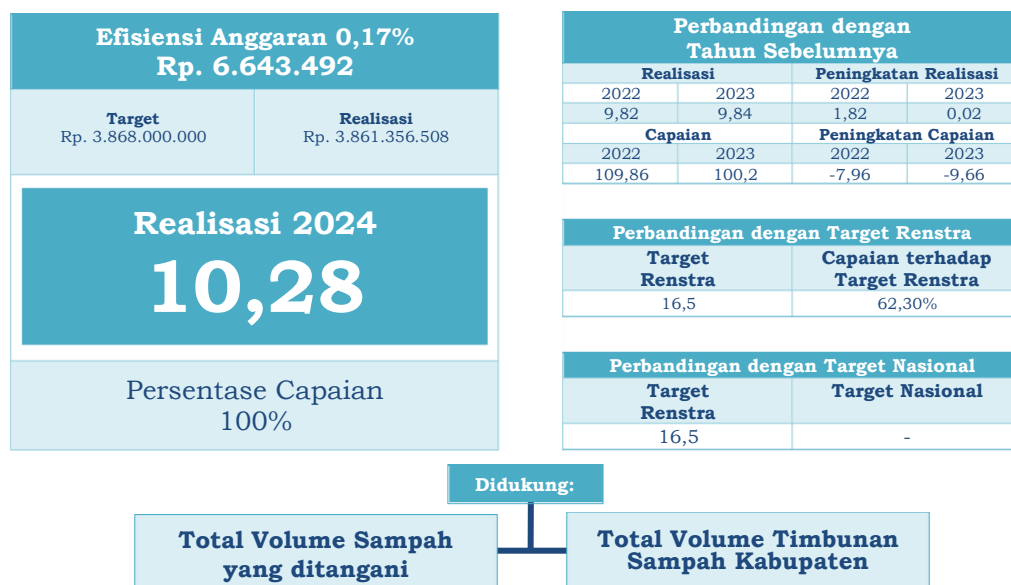
Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

SASARAN-4

Meningkatnya pengelolaan sampah

IKU – 10 :

Persentase jumlah sampah yang tertangani

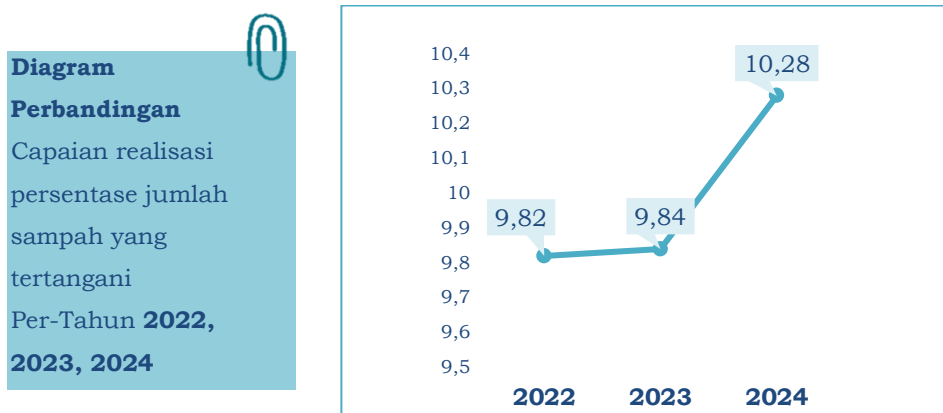


Persentase jumlah sampah yang tertangani adalah proporsi sampah yang telah dikelola dan diolah dengan baik, seperti dipilah, diolah, dan dibuang secara benar, dari total jumlah sampah yang dihasilkan di suatu wilayah atau daerah.

Pengukuran persentase jumlah sampah yang tertangani dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah atau daerah, serta memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pengurangan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pada tahun 2024, realisasi persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan sebesar 0,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi penurunan sebesar 0,2% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 62,80%. Meskipun demikian, persentase jumlah sampah yang tertangani dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga persentase jumlah sampah yang tertangani semakin mendekati target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren

data, capaian persentase jumlah sampah yang tertangani dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi persentase jumlah sampah yang tertangani tercatat sebesar 9,82%, pada tahun 2023 mencapai 9,84%, dan pada tahun 2024 mencapai 10,28%.



Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya hanya mencakup 13 kecamatan dari total 39 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ke-13 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Rajapolah, Cisayong, Mangunreja, Sukarame, Jamanis, Leuwisari, Padakembang, Salawu, Tanjungjaya, dan Sukaratu. Total sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup di kecamatan-kecamatan ini tercatat sebanyak 36.157 ton, yang merupakan sebagian kecil dari total timbunan sampah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebesar 351.785 ton. Artinya, sekitar 10,26% dari total sampah di Kabupaten Tasikmalaya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, sementara sebagian besar, yakni sekitar 89,74%, dikelola melalui upaya mandiri oleh masyarakat di kecamatan lainnya.

Sementara itu, untuk 26 kecamatan lainnya, penanganan sampah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat, dengan total sampah yang dikelola mencapai 331.092 ton. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan sampah, meskipun tantangan dalam hal kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Jika dibandingkan dengan nasional, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2024, total timbulan sampah di Indonesia mencapai 26.359.101,15 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 14,04% atau sekitar 3.701.541,25 ton berhasil dikurangi, dan 47,69% atau sekitar 12.571.931,21 ton ditangani dengan baik. Secara keseluruhan, 61,74% atau sekitar 16.273.472,46 ton sampah berhasil dikelola, sementara sisanya, 38,26% atau sekitar 10.085.628,69 ton, belum terkelola dengan baik.

Berikut perhitungannya persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Tasikmalaya, dihitung dengan formulasi jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton) dikali 100%. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah sampah yang tertangani oleh bidang lingkungan hidup sebanyak 36157 ton dari total jumlah timbunan sampah di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 351785 ton.

$$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{36157 \text{ ton}}{351785 \text{ ton}} \times 100\% = 10,28\%$$

Sumber: Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya 2024



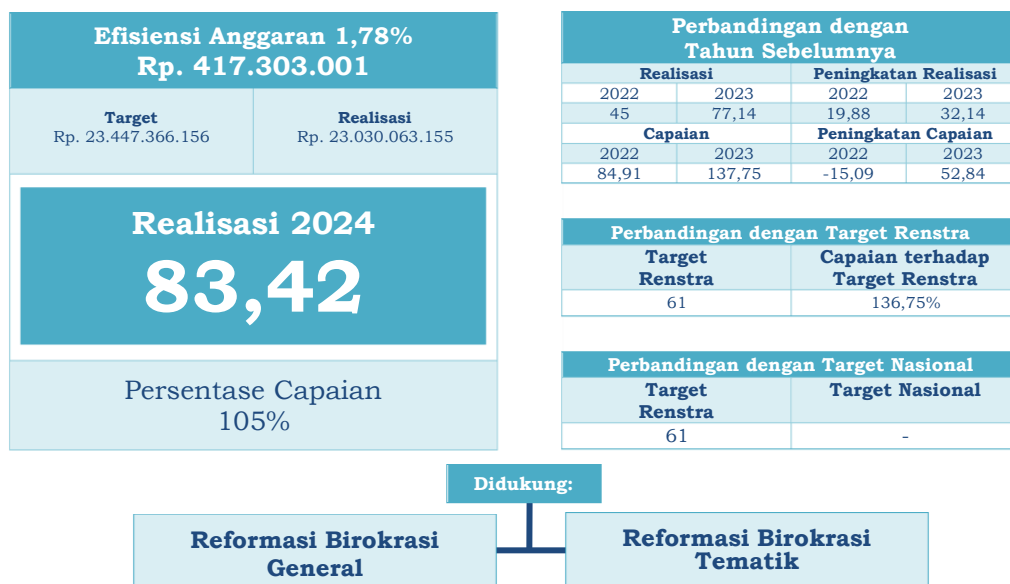
Gambar 3.10.
Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

SASARAN-5

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah

IKU – 11 :

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



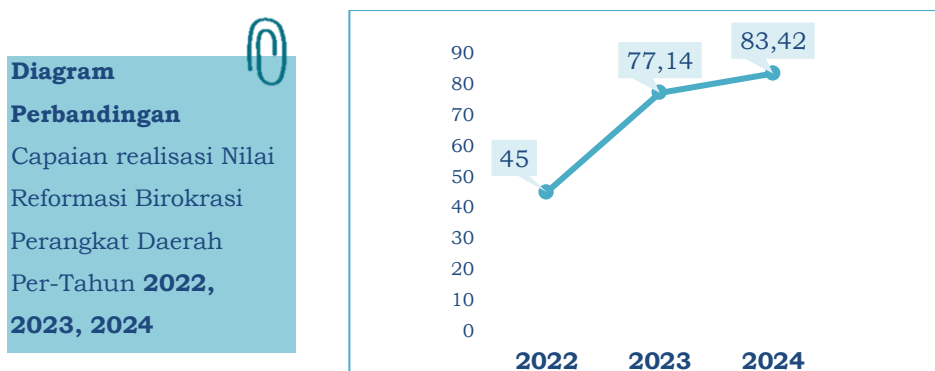
Reformasi birokrasi adalah langkah penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mencapai good governance. Pelaksanaan reformasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024, yang mengubah Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan dilakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme evaluasi reformasi birokrasi.

Evaluasi reformasi birokrasi terbagi menjadi dua jenis: evaluasi internal yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, dan evaluasi eksternal yang mengukur dampak dari pelaksanaan reformasi. Dalam dimensi RB General, fokusnya adalah pada perbaikan tata kelola pemerintahan secara umum, sedangkan RB Tematik lebih menekankan pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat terkait dengan tema-tema prioritas pembangunan nasional.

Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, yang juga mengikuti peraturan ini, menargetkan nilai RB sebesar 79,22 pada tahun 2024. Penilaian dilakukan melalui self-assessment dan evaluasi dari tim internal serta Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024, Dinas PUTRLH berhasil mencapai nilai 83,42, melampaui target dan memperoleh predikat "**Sangat Baik**". Ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan nilai 45,00 pada 2022 dan 77,14 pada 2023. Peningkatan yang tercapai ini disebabkan oleh komitmen seluruh pihak di Dinas PUTRLH untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama melalui peningkatan indikator sasaran strategis dan kebijakan digitalisasi.

Dinas PUTRLH berada di bawah dua naungan kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup memperoleh nilai 97,80 dengan kategori AA (Istimewa), yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Dinas PUTRLH yang sebesar 83,42 dengan kategori A (Sangat Baik). Dengan selisih 14,38, ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas PUTRLH telah mengalami kemajuan signifikan, masih terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar yang lebih tinggi, seperti yang dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Adapun berikut diagram yang menunjukkan tren kenaikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2022 hingga 2024. Terlihat adanya peningkatan signifikan pada nilai RB dari 45,00 pada tahun 2022, menjadi 77,14 pada tahun 2023, dan mencapai 83,42 pada tahun 2024, menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas PUTRLH.



Secara keseluruhan, upaya reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Dinas PUTRLH sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang ada, dan menunjukkan hasil yang memuaskan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pada sub bab ini juga akan diuraikan 7 (tujuh) analisis yang digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi. Penjelasan mengenai masing-masing analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 sampai dengan Tabel 3.8. berikut ini.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN				KEUANGAN		
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berda sarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,568	0,568	100	137.086.486.494	133.948.738.034	97,71
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,45%	70,45%	100	43.592.370.000	43.230.441.400	99,17
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	61,50%	61,50%	100	12.943.150.000	12.515.629.550	96,70
		Ketaatan terhadap RTRW	26,62%	26,62%	100	595.200.000	593.886.892	99,78
2	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	66,93%	66,93%	100	23.154.639.000	22.676.623.550	97,94
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	50,69%	50,69%	100	19.682.402.000	19.578.672.200	99,47
		Rasio rumah layak huni	0,2546	0,2546	100	570.000.000	569.810.000	99,97
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,28%	52,28%	100	505.950.000	496.542.600	98,14
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,88	65,51	101	3.064.953.000	3.041.052.260	99,22

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KEUANGAN		
						ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	10,28%	10,28%	100	3.868.000.000	3.861.356.508	99,83
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,22	83,42	105	23.447.366.156	23.030.063.155	98,22

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun Pelaporan Dan Realisasi Pada Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN		
			2022	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,542	0,566	0,568
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,51	69,99	70,45
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	51,40	59,08	62,39
	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	22,44	26,61	26,62
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,97	66,44	66,93
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	49,16	50,43	50,69
	Rasio rumah layak huni		0,2535	0,2541	0,2546
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,16	52,18	52,28
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43	63,73	65,51
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9,05	9,84	10,28
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	45	77,14	83,42

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun Pelaporan Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN RALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN RALISASI KINERJA S/D TAHUN 2024	TARGET PADA PERIODE AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2024
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,566	0,568	0,609	93,27%
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,99	70,45	71,39	98,68%
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	59,08	62,39	71,96	85,46%
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	26,61	26,62	45,06	59,08%
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,44	66,93	67,92	98,54%
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,43	50,69	51,19	99,02%
7.	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2541	0,2546	0,2552	99,76%
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,18	52,28	52,94	98,75%
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,73	65,51	65,18	99,54%
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9,84	10,28	16,5	76,18%
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	77,14	83,42	61	136,77%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Pengukuran kinerja juga melakukan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan realisasi kinerja nasional (*benchmark kinerja*) tahun 2024. Salah satu contoh dari perbandingan tersebut adalah indikator persentase kemantapan jalan dimana persentase capaian kemantapan jalan pada level nasional sebesar 94,2% sedangkan persentase capaian kemantapan jalan level kabupaten sebesar 93,27%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Pencapaian Kinerja Pada Tahun Pelaporan Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Peningkatan/ Penurunan Pencapaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERBANDINGAN KINERJA 2023 DENGAN 2024		ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA	ALTERNATIF SOSLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
				ME- NINGKAT	ME- NURUN		
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	100,65 %	100 %		√	Adanya beberapa ruas jalan dalam kondisi baik yang diserahkan ke Provinsi	Optimalisasi pemeliharaan berkala dan rutin jalan untuk menjaga kondisi jalan
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100 %	100 %	-	-	Pelaksanaan program sesuai dengan yang telah direncanakan	Optimalisasi pengawasan pekerjaan di lapangan
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	105 %	100 %		√	Meningkatnya perhatian stakeholder untuk perbaikan gedung negara terutama Kantor Kecamatan	Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan
4.	Ketaatan terhadap RTRW	79,72 %	100 %	√		Meningkatnya ketaatan terhadap struktur ruang	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi
5.	Persentase penduduk berakses air minum	100 %	100 %	-	-	Pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah direncanakan	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	101,24 %	100 %		√	Menurunnya proporsi bantuan dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan koordinasi dan penambahan usulan bantuan
7.	Rasio rumah layak huni	100 %	100 %	-	-	Pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah direncanakan	Meningkatkan koordinasi dan penambahan usulan bantuan
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	99,60 %	100 %	√		Meningkatnya perhatian stakeholder dalam percepatan serah terima PSU Perumahan	Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi PSU Perumahan yang belum diserahkan
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	98,23 %	101 %	√		Adanya bantuan alat uji pengukuran kualitas air dan udara	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100 %	100 %	-	-	Pelaksanaan program sesuai dengan yang telah direncanakan	Meningkatkan koordinasi untuk penambahan armada angkut sampah
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	137,75 %	105 %		√	Pelaksanaan program sesuai direncanakan	Penguatan capaian RB General dan Tematik

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berda sarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawa san lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	100	97,71	2,29
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100	99,17	0,83
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	100	96,70	3,3
	Ketaatan terhadap RTRW	100	99,78	0,22
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	100	97,94	2,06
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100	99,47	0,53
	Rasio rumah layak huni	100	99,97	0,03
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100	98,14	1,86
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101	99,22	1,78
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	99,83	0,17
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	105	98,22	6,78

7) Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	56,56	56,62	100,11%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	737,22	810,09	109,88%
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	Ha	40871,24	40871,24	100%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	Ha	40671,24	40671,24	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	%	59,3	59,3	100%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun	Unit	51	51	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	%	70,29	70,29	100%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan lingkungannya yang telah dibangun	Unit	134	134	100%
Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	38,46	38,46	100%
		Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	36,08	36,08	100%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	Dok	4	4	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya	Ha	637,92	637,92	100%
Persentase penduduk berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	%	20,5	20,5	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	Jiwa	1207138	1214548	100,61%
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	%	45,8	45,8	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	Rumah	253924	253987	100%
Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	100%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani	Laporan	1	1	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Unit	5	5	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	%	80,92	80,92	100%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	Unit	408207	408207	100%
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	0,96	0,96	100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	Unit	244559	244559	100%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100	100	100%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Dok	7	7	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	70	70	100%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Lap	13	13	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	%	0.78	0.78	100%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan RTH yang dikembangkan	Ha	36,68	36,68	100%
Persentase jumlah sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	Kubik	143990	143990	100%
	Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	%	55,55	55,55	100%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,82	72,82	100%
		IKM	Persen	83,06	83,06	100%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan	Dok	13	13	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%

8) Upaya perbaikan dan penyusunan kinerja

Langkah atau upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun 2025 yang sudah diupayakan pada tahun 2024 diantaranya dengan mengembangkan strategi perbaikan dan peningkatan koordinasi terkait isu-isu nasional seperti pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi daerah.

Untuk penanganan stunting, telah diusulkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan air bersih dan sanitasi layak di Lokus Stunting;

Untuk pengendalian inflasi daerah, pada tahun 2024 telah diusulkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat serta peningkatan alokasi APBD Tahun 2025 untuk perbaikan kualitas jalan dimana Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya berperan dalam peningkatan distribusi dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai upaya peningkatan peran Dinas dalam menjaga ketersediaan pasokan.

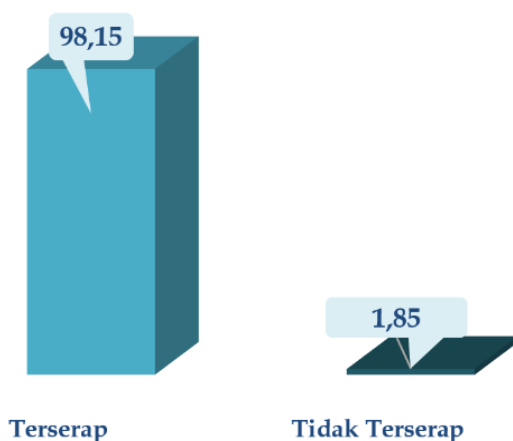
B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 menyelenggarakan 16 (Enam Belas) Program, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan dan 51 (Lima Puluh) Subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 268.510.516.650,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Lima Ratus Sepuluh Juta Lima

Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 263.542.816.149,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,15%.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024



Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Bulan Desember 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Akuntabilitas Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEUANGAN			EFISIENSI	
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	Rp.	%
Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarakan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	100%	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	137.086.486.494	133.948.738.034	97,71%	3.137.748.460	2,29%
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	43.592.370.000	43.230.441.400	99,17%	361.928.600	0,83%
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.799.535.700	10.596.501.850	98,12%	203.033.850	1,88%
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.143.614.300	1.919.127.700	89,53%	224.486.600	10,47%
Ketaatan terhadap RTRW	100%	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	595.200.000	593.886.892	99,78%	1.313.108	0,22%	
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.154.639.000	22.676.623.550	97,94%	478.015.450	2,06%
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.682.402.000	19.578.672.200	99,47%	103.729.800	0,53%
	Rasio rumah layak huni	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	150.000.000	149.815.000	99,88%	185.000	0,12%
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	420.000.000	419.995.000	100,00%	5.000	0,00%
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100%	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	505.950.000	496.542.600	98,14%	9.407.400	1,86%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERSEN-TASE CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEUANGAN			EFISIENSI	
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	Rp.	%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	267.050.000	265.269.260	99,33%	1.780.740	0,67%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.497.903.000	1.494.358.000	99,76%	3.545.000	0,24%
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.300.000.000	1.281.425.000	98,57%	18.575.000	1,43%
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.868.000.000	3.861.356.508	99,83%	6.643.492	0,17%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	105%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.447.366.156	23.030.063.155	98,22%	417.303.001	1,78%
JUMLAH				268.510.516.650	263.542.816.149	98,15%	4.967.700.501	1,85%

C. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 5 sasaran, terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,85 % atau senilai Rp. 4.967.700.501 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan ” tercapai melalui kinerja “Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan, dan Ketaatan terhadap RTRW” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 6,64%.
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak” tercapai melalui kinerja “Persentase penduduk berakses air minum, Persentase rumah tinggal berakses sanitasi, Rasio rumah layak huni, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 4,7%.

3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” tercaai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” sebesar 101% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,78%.
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya pengelolaan sampah” tercapai melauai kinerja “Persentase jumlah sampah yang tertangani” sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,17%.
5. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah” tercapai melalui kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” sebesar 105% dengan efisiensi anggran sebesar 1,78%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pada tahun ini, Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk tahun kedua Renstra, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi di tahun sebelumnya.

Capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya diukur dan diperoleh dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 5 (lima) Sasaran Strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Rata-rata capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebesar 100,55% dengan kategori **BAIK**. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh insan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan arahan Renstra dan direktif Kepala Daerah.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Perangkat Daerah, maka diharapkan penyusunan LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini dapat memenuhi fungsinya sebagai :

1. Sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan organisasi dalam menjalankan misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan;

5. Cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan; dan
6. Bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah yang disusun oleh pemerintah daerah.

Tasikmalaya, 31 Januari 2025

**KEPALA DPUTRLH
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



Drs. AAM RAHMAT SELAMET, M.Pd
NIP. 19680813 199203 1 009



**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMLAYA**

Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1.200
Mangunreja - 46462